

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini pembangunan di Indonesia sedang giat-giatnya dilaksanakan di segala bidang melalui berbagai program pembangunan. Umumnya program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan dalam jangka panjang. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan. Adapun tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional, dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan sektoral di daerah. Pembangunan sektoral tersebut dilakukan sesuai prioritas, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Beberapa waktu terakhir ini, tuntutan sejumlah daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas atau bahkan tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin sering terdengar. Tuntutan otonomi luas dari berbagai daerah tampaknya akan terus meningkat karena berkembangnya kesadaran bahwa pembangunan yang bersifat sentralistis tidak dapat diandalkan lagi dalam usaha mencapai sasaran pembangunan yang sesuai dengan kehendak rakyat (Silalahi,2000:87-95).

Menitik beratkan otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) Menurut Ryas Rasyid (2000:1) dimaksudkan agar lebih memberi harga diri terhadap masyarakat dan memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk secara kreatif memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Berkaitan dengan itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu UU No.22 Thn.1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Thn.1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu Propinsi yang diberikan otonomi daerah oleh Pemerintah adalah Propinsi Papua di mana otonomi daerah ini di berikan karena sebagian rakyat Papua menginginkan berpisah dengan Indonesia, hal ini disebabkan masyarakat Papua merasa dijajah oleh para pendatang yang datang dari luar Propinsi Papua. Salah satu cara untuk mengatasi supaya Propinsi Papua tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah memberikan Otonomi khusus kepada Propinsi Papua. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002, otonomi khusus di Propinsi Papua mulai dilaksanakan.

Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Propinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi

Propinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Propinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini dipandang perlu untuk meningkatkan budaya demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Pelaksanaan otonomi akan sangat memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, artinya daerah-daerah yang diotonomikan akan memiliki keleluasaan dalam memperoleh keunggulan kompetitif daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing (Syaukani, 2001:191).

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan keanekaragaman daerah. Artinya penyelenggaraan Otonomi secara aktual memberdayakan seluruh

komponen dan potensi daerah setempat berdasar kaidah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syaukani,2001:192).

Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan menjadi prioritas dalam Otonomi Khusus Papua, dengan pertimbangan bahwa kekayaan sumber daya alam di Papua harus dikelola dengan basis ekonomi kerakyatan. Sementara itu, kondisi Papua yang luas dan sulit dijangkau menjadi alasan diutamakannya pembangunan infrastruktur. Hubungan satu daerah dengan daerah lain di Papua harus dibuka dengan cara membangun infrastruktur yang memadai, misalnya jalan tembus, lapangan terbang, dan dermaga.

Ini berarti kepada setiap daerah diberikan kebebasan untuk memilih dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan potensi-potensi daerah setempat. Hal ini ditegaskan kembali dalam GBHN 1999-2004 yang menyatakan bahwa yang dikembangkan adalah (1999:95):

...perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai Negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Adapun mengenai pembangunan daerah, dalam GBHN yang sama ditegaskan bahwa yang dikembangkan adalah (1999:75):

...otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hokum, lembaga keagamaan, lembaga adapt, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

dari ketentuan di atas dapat disimpulkan setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sebagai produk unggulan, namun setiap upaya pembangunan tersebut harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga setiap warga Negara Indonesia berhak mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Secara makro perkembangan perekonomian dapat ditunjukkan oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut berarti semakin maju daerah tersebut dan sejahtera pula daerah tersebut, salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun. PDRB itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa sektor ekonomi yaitu:

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
- c. Sektor Industri Pengolahan
- d. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum
- e. Sektor Bangunan
- f. Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel
- g. Sektor Transportasi dan Komunikasi
- h. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- i. Sektor jasa-jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor ekonomi tersebut di atas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Hal tersebut

dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut tampak bahwa PDRB seluruh propinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari harga konstan tahun 1993, PDRB Indonesia dari tahun 1999, tercatat sebesar Rp.379.352,473 milyar, dan Rp.426.740,546 milyar pada tahun 2002. Hal ini berarti telah terjadi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,79 persen, 4,92 persen, 3,44 persen dalam tahun 1999, 2000, dan 2001, sedang pada tahun 2002 sebesar 3,66 persen. Tingkat PDRB yang berbeda di masing-masing propinsi menunjukkan corak strategi perencanaan dan pembangunan yang diterapkan di tiap daerah berbeda. Untuk mewujudkan agar tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terealisasi dengan baik, maka setiap propinsi seharusnya mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki. Juga diperlukan peran pemerintah yang mampu mendukung pembangunan di tiap daerah.

Jika pertumbuhan setiap daerah dapat ditingkatkan, hal tersebut tentunya sangat mendukung adanya peningkatan pendapatan nasional. Di mana prestasi pembangunan suatu bangsa atau Negara dapat dinilai dengan Pendapatan Nasional (*National Income*). Istilah “Pendapatan Nasional” ini dapat berarti sempit atau luas. “Pendapatan Nasional” dalam arti sempit adalah terjemahan dari *National Income*, sedangkan dalam arti luas, salah satunya dapat merujuk ke PDB/ *Gross Domestic Products* (GDB). PDB itu sendiri sebagaimana diketahui dapat dihitung atau diukur dengan tiga (3) macam pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
Menurut Propinsi Tahun 1999-2002
(Juta Rupiah)

PROPINSI	1999	2000	2001*	2002**	Laju Pertumbuhan PDRB (%)			
					1999	2000	2001*	2002**
1. Nanggro Aceh Darusalam	9.949.896	9.129.358	9.237.840	9.249.480	-4.91	-8.25	1.19	0.13
2. Sumatera Utara	22.910.086	24.016.595	24.911.048	25.91.696	2.59	4.83	3.72	4.04
3. Sumatera Barat	7.577.036	24.016.595	8.153.962	8.503.928	1.59	3.84	3.63	4.29
4. Riau	20.308.602	21.633.022	22.552.524	23.544.880	3.38	6.52	4.25	4.40
5. Jambi	3.181.314	3.345.146	3.515.566	3.636.903	2.90	5.43	4.81	3.45
6. Sumatera Selatan	11.637.125	12.025.512	12.313.753	12.749.219	0.83	3.34	2.40	3.54
7. Kep. Bangka Belitung	-	1.872.602	1.976.771	2.070.432	-	-	5.56	4.74
8. Bengkulu	1.678.279	1.744.250	1.814.479	1.892.935	2.88	3.93	4.03	4.32
9. Lampung	6.938.425	7.174.245	7.433.265	7.816.357	3.54	3.40	3.61	5.15
10. DKI Jakarta	57.215.224	59.694.419	61.865.971	64.259.075	-0.29	4.33	3.64	3.87
11. Jawa Barat	53.442.335	55.660.205	57.824.843	60.096.782	-7.79	4.15	3.89	3.93
12. Banten	-	16.540.147	17.340.654	18.216.573	-	-	4.84	5.05
13. Jawa Tengah	39.394.514	40.941.667	42.305.176	43.759.541	3.49	3.93	3.33	3.44
14. DI Yogyakarta	4.824.446	5.017.709	5.182.544	5.357.669	0.99	4.01	3.29	3.38
15. Jawa Timur	55.058.970	56.856.512	58.750.180	60.754.056	1.21	3.26	3.33	3.41
16. Bali	7.299.401	7.512.841	7.777.071	8.021.669	0.67	3.05	3.39	3.15
17. Kalimantan Barat	7.065.793	7.274.000	7.409.948	7.559.183	2.71	2.95	1.87	2.01
18. Kalimantan Tengah	4.032.225	4.092.515	4.203.919	4.341.375	0.98	1.50	2.72	3.27
19. Kalimantan Selatan	6.157.938	6.424.665	6.665.209	6.869.600	4.53	4.33	3.74	3.07
20. Kalimantan Timur	21.519.670	22.384.086	23.513.161	24.521.451	4.90	4.02	5.04	4.29
21. Sulawesi Utara	3.036.896	3.220.688	3.357.569	3.490.692	5.96	6.05	4.25	3.96
22. Gorontalo	-	918.614	968.046	1.030.221	-	-	5.38	6.42
23. Sulawesi Tengah	2.287.380	2.383.700	2.507.463	2.643.128	2.80	4.21	5.19	5.41
24. Sulawesi Selatan	9.631.076	10.101.948	10.603.662	11.092.996	2.83	4.89	4.97	4.61
25. Sulawesi Tenggara	1.588.457	1.672.193	1.766.340	1.880.970	2.55	5.27	5.63	6.49
26. Nusa Tenggara Barat	3.398.362	4.377.225	4.770.688	4.946.937	4.24	28.80	8.99	3.69
27. Nusa Tenggara Timur	2.834.212	2.952.372	3.103.059	3.287.944	2.73	4.17	5.10	5.96
28. Maluku	1.336.498	1.297.502	1.276.998	1.314.720	-27.38	-2.92	-1.58	2.95
29. Maluku Utara	-	858.442	872.225	891.160	-	-	1.61	2.17
30. Papua	8.162.153	9.338.145	8.202.084	8.916.759	-3.48	2.16	-1.63	8.71
Jumlah 30 Propinsi	372.466.312	407.346.581	422.176.019	438.635.332	0.07	9.36	3.64	3.90
Indonesia	379.352.473	398.016.853	411.619.036	426.740.546	0.79	4.92	3.44	3.66

Sumber: Statistik Indonesia tahun 1999-2002

Cacatan: *) angka sementara dan **) angka sangat sementara

Peningkatan PDB ini didukung oleh adanya kontribusi dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua propinsi di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk terus mendukung serta menciptakan iklim kondusif agar setiap pembangunan yang dilaksanakan di seluruh propinsi dapat berjalan dengan baik. Adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa bantuan

keuangan dan tenaga ahli yang didatangkan dari pusat. Dengan demikian, hasil pembangunan di daerah tersebut dapat dikonstruksikan bagi pembangunan daerah itu sendiri dan juga pembangunan nasional.

Seperti halnya propinsi-propinsi yang lain, propinsi Papua sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi, keadaan ini ditopang oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi yang tumbuh sangat optimis. Propinsi Papua memiliki potensi yang dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam pertumbuhan PDRB propinsi Papua selama empat tahun terakhir, yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

Tinggi rendahnya PDRB per Kapita suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah serta jumlah penduduk daerah tersebut. Perbandingan PDRB per Kapita suatu daerah dengan daerah lainnya dipengaruhi oleh unsur pertumbuhan PDRB itu sendiri dan juga pertumbuhan penduduk wilayah tersebut.

Keseluruhan pembangunan harus terus terkoordinir dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu juga sektor-sektor ekonomi mampu memberikan kontribusi terbesar yang patut dikembangkan sekaligus diprioritaskan sebagai andalan dalam perekonomian pembangunan daerah. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertumbuhan sektoral perekonomian propinsi Papua selama tahun 1998-2003.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan penelitian ini adalah sektor ekonomi mana yang merupakan sektor potensial (sektor basis) dalam struktur perekonomian propinsi Papua tahun 1998-2003 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor ekonomi yang merupakan sektor potensial (sektor basis) dalam struktur perekonomian Propinsi Papua tahun 1998-2003.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Bagi Pemerintahan Papua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk mengetahui sektor ekonomi yang merupakan sektor potensial dalam struktur perekonomian Propinsi Papua dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya.

2) Bagi masyarakat Papua

Dalam upaya pembangunan daerah dimasa yang akan datang, maka masyarakat Papua harus memperhatikan sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pertanian dan pertambangan, dimana hal ini akan mempengaruhi pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

1.5. Tinjauan Pustaka

Rostow, dalam bukunya yang berjudul “ *The Stages Of Economics Growht* “ yang diterjemahkan oleh Sukirno (1985) membedakan proses pembangunan ekonomi ke dalam lima (5) tahap yaitu masyarakat tradisional (*The Tradisional Society*), prasyarat untuk lepas landas (*The Preconditions For Take-Off*), tinggal landas (*The Take-Off*), menuju kedewasaan (*The Drive To Maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*The Age Of High Mass-Consumption*). Dasar pembedaan proses pembangunan ekonomi menjadi lima (5) tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti perubahan struktur ekonomi suatu Negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri jasa, tetapi pembangunan ekonomi berarti pula suatu proses yang menyebabkan perubahan – perubahan di segala bidang , antara lain : perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga dan perubahan dalam kegiatan penanaman modal dari melakukan penanaman modal yang tidak produktif menjadi ke hal-hal yang produktif.

Pada bagian ini dapat dilihat beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu :

Penelitian ini dilakukan oleh Sri Susilo (1999) tentang pergeseran dan prospek Sektoral di kabupaten Dati II Sleman Propinsi DIY. Alat analisis yang digunakan adalah *Mix-Share Analysis* dan *Location Quotient*. Pengamatan yang

dilakukan secara runtut (*time series*) periode 1991-1996. Sektor-sektor ekonomi yang ditinjau dalam penelitian ini adalah: sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, transformasi dan komunikasi, bank, sewa rumah, pemerintah dan jasa-jasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di kabupaten Dati II Sleman yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah sektor sewa rumah, sektor jasa, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan perdagangan. Implikasinya, setelah memperhatikan kemampuan regional serta keunggulan komparatif daerah terhadap daerah referensi (Propinsi DIY), maka pemerintah daerah harus secara bertahap dan konsisten untuk mengembangkan sektor sewa rumah, industri pengolahan, jasa, bangunan dan perdagangan.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh Badrudin (1999) mengenai pengembangan wilayah propinsi DIY. Dalam penelitian ini digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Dalam pengamatan, peneliti menggunakan data PDRB propinsi DIY tahun 1997. Sektor-sektor ekonomi yang ditinjau dalam penelitian ini ada 11 sektor yaitu : sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, bank dan lembaga, sewa rumah, pemerintah dan jasa-jasa lain. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa propinsi DIY memiliki sektor-sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah sektor pertanian, bangunan, sewa rumah, pemerintah dan jasa-jasa lainnya.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh Isvan Y Ristianoro (2000) mengenai Analisis Potensi Sektoral Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1983-1997. Dalam penulisan tersebut menunjukkan sektor jasa mempunyai peranan dan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta atau termasuk kategori "*Leading Sector*" atau sektor pemimpin. Sektor lain juga cukup potensial untuk dikembangkan, meskipun kontribusinya masih relatif kecil.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh Theresia Seda (2000) mengenai Analisis *Shift-Share* Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Jawa Timur 1993-1998. Dalam penulisan tersebut dapat dilihat adanya perubahan struktur dalam perekonomian Propinsi Jawa Timur. Jika sebelumnya sektor pertanian merupakan sektor yang kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB propinsi Jawa Timur paling besar, maka dewasa ini sektor industri pengolahanlah yang mempunyai peranan atau kontribusi terbesar dalam pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur. Sektor-sektor yang lain meskipun kontribusinya kecil tetapi mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dan berkembang di masa mendatang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisa ini diambil dari data sekunder, yang berasal dari :

1) Badan Pusat Statistik

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menurut sektor ekonomi tahun 1998-2003 dengan harga konstan tahun 1993.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi Papua menurut sektor tahun 1998-2003 dengan harga konstan tahun 1993.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) propinsi Papua

- a. Papua Dalam Angka
- b. Pelita IV Daerah dan Pola Dasar Pembangunan Daerah

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah sembilan (9) sektor ekonomi di propinsi Papua, yang dikelompokkan dalam :

1) Kelompok Sektor Primer, yang terdiri dari :

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Pertambangan dan Panggalian

2) Kelompok Sektor sekunder, yang terdiri dari :

- c. Sektor Industri Pengolahan
- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum
- e. Sektor Bangunan

3) Kelompok Sektor Tersier, yang terdiri dari :

- f. Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel
- g. Sektor Transportasi dan Komunikasi
- h. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan
- i. Sektor Jasa-Jasa

1.6.2. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis perencanaan pembangunan yaitu : Analisis *Shift-Share* dan Analisis *Location Quotient*.

1.6.2.1. Analisis *Shift-Share* (S-S)

Teknik analisis *Shift-Share* (S-S) adalah suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan. Teknik ini menganalisis bagaimana pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian daerah tumbuh dari tahun ke tahun terhadap perekonomian secara nasional. Caranya adalah dengan membandingkan kinerja sektor ekonomi di daerah dengan kinerja sektor ekonomi secara nasional. Dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah dengan sektor ekonomi nasional, akan dapat dilihat adanya pergeseran atau perubahan (*Shift*) sektor-sektor perekonomian daerah dan juga dapat dilihat pertumbuhan dan kemajuan daerah itu sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Menurut Soepono (1993), teknik analisis *Shift-Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), bauran industri (*industry mix*) (M), dan keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau *regional share*. Pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *regional share*. Karena itulah maka teknik analisis ini dinamakan teknik analisis *Shift-Share*.

Adapun bentuk umum dari persamaan analisis *Shift-Share* dan komponen-komponennya adalah sebagai berikut :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (1)$$

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan persektor yang dinotasikan (Y)

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n \quad (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \quad (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (5)$$

Di mana:

r_{ij} , r_{in} , dan r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{(Y^*_{ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}} \quad (6)$$

$$r_{in} = \frac{(Y^*_{in} - Y_{in})}{Y_{in}} \quad (7)$$

$$r_n = \frac{(Y^*_n - Y_n)}{Y_n} \quad (8)$$

Secara keseluruhan, persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (9)$$

Keterangan :

D = nilai *shift-Share*

N = Pertumbuhan Nasional

C = Keunggulan Kompetitif

M = Bauran Industri (*industry mix*)

Y_{ij} = Pendapatan sektor i di wilayah j (propinsi Papua) tahun 1998

Y_{in} = Pendapatan sektor i di tingkat nasional tahun 1998

Y_n = Pendapatan nasional tahun 1998

$*$ = Pendapatan tahun terakhir analisis tahun 2003

i = sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Wilayah yang diteliti

Tanda positif atau negatif dari masing-masing indikator, baik itu pertumbuhan nasional, bauran industri maupun keunggulan kompetitif (*regional share*) menunjukkan posisi sektor di daerah tersebut akan meningkat (menurun) selama periode yang diamati.

Definisi dari variabel yang digunakan yakni :

- 1) N_{ij} = Untuk melihat struktur atau posisi relatif sektor ekonomi pada propinsi yang dianalisis dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) M_{ij} = Mengukur sejauh mana laju pertumbuhan output pada suatu sektor di suatu wilayah, berbeda dengan laju pertumbuhan output pada sektor yang sama di tingkat nasional. Dengan kata lain, M_{ij} memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.

- 3) C_{ij} = Untuk melihat potensi keuntungan lokasi pada suatu wilayah terhadap sektor ekonomi wilayah tersebut.
- 4) D_{ij} = Untuk mengukur *share* suatu sektor ekonomi di suatu wilayah.

1.6.2.2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teknik analisis *Location Quotient* merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah, dengan daerah lain dalam konsep regional, terutama bagi daerah-daerah yang homogen. Cara perhitungannya adalah dengan membandingkan distribusi persentase sektor-sektor perekonomian yang sama dari daerah lain yang lebih luas (dalam hal ini sektor-sektor di Indonesia). Unit ukuran yang biasa digunakan adalah tingkat kesempatan kerja. Namun unit ukuran yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat PDRB.

Secara singkat koefisien LQ dapat dirumuskan sebagai berikut

(Bendavid-Val,1992:74).

$$LQ = \frac{\frac{X_r}{RV_r}}{\frac{X_n}{RV_n}} = \frac{X_r \text{ sebagai bagian dari } RV_r}{X_n \text{ sebagai bagian dari } RV_n}$$

Atau :

$$\frac{\frac{X_r}{X_n}}{\frac{RV_r}{RV_n}} = \frac{X_r \text{ sebagai bagian dari } X_n}{RV_r \text{ sebagai bagian dari } RV_n}$$

Keterangan :

LQ = Koefisien *Location Quotient*

X_r = Kontribusi sektor X pada PDRB di Papua

X_n = Kontribusi sektor X pada PDB nasional

RV_r = Total PDRB propinsi Papua

RV_n = Total PDB nasional

Klasifikasi koefisien LQ adalah :

$LQ > 1$: Menunjukkan bahwa jika LQ lebih besar dari satu, maka kemampuan produksi sektor ekonomi suatu daerah relatif lebih besar dibandingkan sektor ekonomi sejenis secara nasional.

$LQ < 1$: Menunjukkan bahwa kemampuan produksi sektor ekonomi suatu daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi sejenis secara nasional.

$LQ = 1$: Kemampuan produksi sektor ekonomi tersebut di suatu daerah sama dengan sektor ekonomi sejenis secara nasional.

Dalam hal ini analisis basis ekonomi dengan menggunakan indeks LQ digunakan untuk melakukan pendekatan sektoral yaitu dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang potensial dan sektor yang kurang potensial. Sektor potensial adalah sektor yang ditujukan untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi di mana ditunjukkan dengan nilai $LQ > 1$. Sedangkan LQ yang kurang dari satu atau $LQ < 1$ menunjukkan sektor tersebut kurang potensial, sehingga tidak terlalu diprioritaskan dalam pengembangannya.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam lima (5) bab, yaitu :

- Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, tinjauan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan teori, yang meliputi teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama mengenai teori perencanaan pembangunan daerah dan konsep pertumbuhan yang diuraikan secara relevan.
- Bab III : Gambaran umum daerah penelitian, yang meliputi gambaran umum tentang letak geografis, keadaan penduduk dan beberapa tinjauan tentang kondisi perekonomian di propinsi Papua serta perkembangan PDRB Propinsi Papua.
- Bab IV : Analisis data, yang meliputi data-data yang diperlukan untuk dihitung, hasil perhitungan analisis *shift-share* dan *location Quotient* serta penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang dilakukan.
- Bab V : Kesimpulan dan saran yang meliputi kesimpulan saran didapat dari hasil perhitungan analisis.